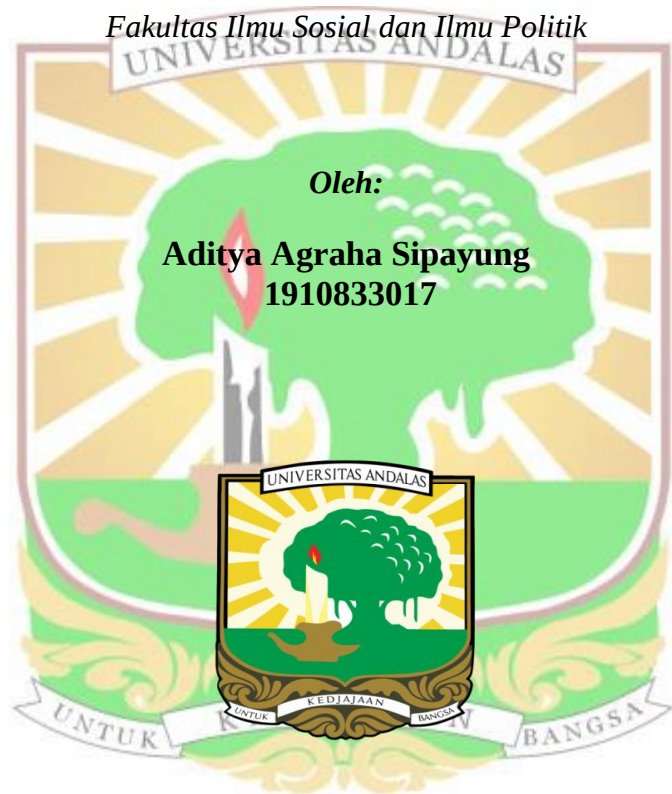


**PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



**DEPARTEMEN LMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kegagalan calon legislatif perempuan dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2009–2024, di mana tidak ada perempuan yang berhasil terpilih meskipun kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan telah terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi formal dan representasi substantif perempuan dalam politik lokal. Penelitian bertujuan menganalisis proses rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan menjelaskan kontribusinya terhadap kegagalan keterpilihan perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada empat partai politik peraih kursi DPRD Mentawai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai, ketua DPC, dan caleg perempuan, serta didukung dokumentasi resmi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Analisis menggunakan teori rekrutmen politik Pippa Norris dan Joni Lovenduski yang meliputi aspek *supply*, *demand*, *gatekeepers*, dan *tokenism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan keterpilihan perempuan lebih banyak disebabkan oleh proses rekrutmen internal partai yang belum inklusif. Keterbatasan kaderisasi perempuan, orientasi partai yang hanya memenuhi kuota administratif, dominasi elite laki-laki dalam pengambilan keputusan, serta minimnya dukungan strategis kepada kandidat perempuan menyebabkan perempuan hanya hadir sebagai pelengkap daftar calon tanpa peluang yang memadai untuk terpilih.

Kata Kunci: kegagalan caleg perempuan, rekrutmen politik, partai politik, keterwakilan perempuan, Kepulauan Mentawai.



ABSTRACT

This study examines the failure of female legislative candidates in the Regional House of Representatives (DPRD) elections of the Mentawai Islands Regency during the 2009–2024 period, in which no female candidate was elected despite the fulfillment of the 30% gender quota requirement in candidate nominations. This condition reflects a gap between formal and substantive representation of women in local politics. The study aims to analyze the recruitment process of female legislative candidates by political parties in the 2024 DPRD election of the Mentawai Islands Regency and to explain how this process contributed to the failure of women to secure legislative seats. This research employs a qualitative approach using a case study method focusing on four political parties that won seats in the Mentawai DPRD, namely the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), the Democratic Party, the National Democratic Party (NasDem), and the Great Indonesia Movement Party (Gerindra). Data were collected through in-depth interviews with party officials, district party leaders, and female legislative candidates, and were supported by official documents from the General Election Commission (KPU) of the Mentawai Islands Regency. The analysis applies the political recruitment framework developed by Pippa Norris and Joni Lovenduski, encompassing the dimensions of supply, demand, gatekeepers, and tokenism. The findings indicate that the failure of female candidates to be elected is largely attributable to non-inclusive internal party recruitment processes. Limited female political cadre development, party orientations focused primarily on fulfilling administrative quota requirements, the dominance of male elites in decision-making processes, and the lack of strategic support for female candidates have resulted in women being included in candidate lists without adequate opportunities to win electoral contests.

Keyword: *female legislative candidates' failure, political recruitment, political parties, women's representation, Mentawai Islands.*

